

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007, ruang merupakan satu kesatuan wilayah yang mencakup ruang darat, laut, udara serta ruang yang ada di bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Sebagai tempat berlangsungnya kehidupan dan aktivitas manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sementara itu, Peraturan Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan terbuka yang dapat berbentuk jalur, memanjang, atau mengelompok, serta ditumbuhi vegetasi yang tumbuh secara alami maupun ditanam secara sengaja. Keberadaan RTH mempertimbangkan berbagai fungsi ekologis hingga estetika. Selain fungsi ekologis dan estetika, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), RTH juga memiliki fungsi social budaya yaitu sebagai ruang interaksi sosial masyarakat, sarana rekreasi, dan wadah kegiatan budaya yang mendukung kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Ketiga fungsi tersebut menjadikan RTH sebagai komponen utama dalam sistem perencanaan kota. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa suatu wilayah mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau minimal sebesar 30% dari luas wilayah dengan proporsi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.

Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari perencanaan kota yang memengaruhi perwujudan kota yang ekologis. Namun, berkembang pesatnya pembangunan dan angka pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya (Nur & Rohmah, 2018). Peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung aktivitas penduduk mengakibatkan alih fungsi lahan ruang terbuka hijau hal ini menjadikan menurunnya daya dukung lingkungan akibat alih fungsi lahan (Juliana, 2012). Penetapan proporsi tersebut oleh pemerintah dalam bertindak sebagai batas minimum yang diperlukan untuk memastikan ekosistem perkotaan. Jenis kepemilikan Ruang Terbuka Hijau dibedakan menjadi 2 yaitu RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga keberadaannya memiliki peran strategis sebagai ruang *social* yang mendukung aktivitas dan interaksi masyarakat secara luas. Hal ini yang menjadikan RTH Publik lebih diprioritaskan dalam perencanaan kota dibandingkan RTH Privat yang aksesnya bersifat terbatas. RTH Publik

menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, berkelanjutan, serta berkualitas bagi masyarakat (Salamuddin et al., 2022).

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 37.135,054 km², terdiri dari 2 Kota dan 11 Kabupaten (BPS, 2025). Salah satunya Kota Banjarbaru merupakan satu dari dua kota yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah. Sejak ditetapkan perpindahan ibu kota Kalimantan Selatan ke kota Banjarbaru menggantikan Banjarmasin pada tahun 2022, hal ini mendorong perkembangan wilayah dan mengalami peningkatan. Kota Banjarbaru terdiri atas lima Kecamatan yang memiliki peran sebagai pusat pertumbuhan sekaligus pusat pemerintahan wilayah. Berdasarkan data Dinas kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang Kota Banjarbaru tahun 2020, luas eksisting RTH Kota Banjarbaru adalah 2.638,8 Ha atau sekitar 7,106% dari luas wilayah Kota Banjarbaru yang terdiri RTH Publik dan RTH Privat. Untuk luas RTH publik tercatat sebesar 2.350,40 Ha sekitar 6,33 % dari luas wilayah Kota Banjarbaru (Saidah, 2021). Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2043 menyebutkan luas RTH yang ada di Kota Banjarbaru seluas 546,18 Ha terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Namun, mengacu pada peraturan tersebut ketersediaan RTH di Kota Banjarbaru belum merata di seluruh kecamatan. dimana beberapa wilayah memiliki proporsi RTH yang lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Yang terletak pada Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Banjarbaru Selatan, menjadi dua wilayah yang memiliki ruang hijau terbatas dan sangat terfragmentasi, karena alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan pembangunan infrastruktur (Rizali *et al.*, 2025).

Berdasarkan penelitian mengenai perubahan lahan di Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang mengalami perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan menjadi kawasan permukiman, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya kerapatan vegetasi dan meningkatnya *Urban Heat Island* (UHI) di wilayah tersebut. Dengan adanya fenomena UHI yang teridentifikasi di Kecamatan Banjarbaru Selatan sejak tahun 2014 ini menunjukkan adanya tekanan lingkungan yang membutuhkan solusi dalam penghijauan secara terencana (Arisanty et al., 2022). Hal tersebut mempengaruhi luas ruang terbuka hijau Kecamatan Banjarbaru Selatan, dengan luas sebesar 12,6 Ha dari total luas wilayah 1.498,01 Ha atau hanya sekitar 0,84% dari luas wilayahnya, mencakup RTH Publik dan RTH Privat, angka tersebut menunjukkan di bawah standar minimal 30% sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024-2043.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Kecamatan Banjarbaru Selatan tahun 2024 sebanyak 49.822 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.320,14 Jiwa/km² (BPS, 2025). Dengan kondisi kepadatan yang cukup tinggi ini menunjukkan semakin besar tekanan terhadap kualitas lingkungan, terutama pada meningkatnya pembangunan kawasan permukiman di wilayah tersebut. Dan kondisi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang rawan banjir karena berada di daerah aliran sungai yang memiliki karakteristik akan meluap apabila intensitas hujan tinggi dan kurangnya daerah resapan air (Helpina, 2021). Dan berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa kota Banjarbaru memiliki potensi bahaya bencana banjir yang berdampak pada 5 kecamatan termasuk Kecamatan Banjarbaru Selatan (BNPB, 2021). Kondisi ini menunjukkan minimnya ketersediaan RTH Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan tidak hanya berdampak pada menurunnya fungsi ekologis wilayah, tetapi juga mengurangi ruang sosial budaya masyarakat untuk berinteraksi dan beraktivitas secara sehat. Sementara itu, RTH Publik yang telah ada belum terdistribusi secara merata sehingga masih terdapat wilayah-wilayah yang belum terlayani oleh RTH Publik eksisting. Oleh karena itu, diperlukan upaya penentuan lokasi alternatif RTH Publik yang didasarkan pada analisis kebutuhan, jangkauan pelayanan, dan kesesuaian lahan, agar pengembangan RTH Publik dapat diarahkan secara tepat sasaran pada wilayah yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk dikembangkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan. Oleh karena itu, perlunya melakukan penelitian berjudul “Penentuan Lokasi Alternatif Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Banjarbaru belum merata pada seluruh Kecamatan. Salah satunya Kecamatan Banjarbaru Selatan yang memiliki proporsi RTH relatif rendah dibandingkan wilayah lainnya. Selain itu, termasuk pada wilayah yang rentan terhadap bencana banjir, sehingga keberadaan RTH Publik menjadi semakin penting dalam mendukung fungsi ekologis wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu menganalisis bagaimana kondisi eksisting ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan dilihat dari luas, persebaran dan aksesibilitasnya, serta bagaimana kesesuaian lokasi untuk pengembangan lokasi RTH yang ada di Kecamatan Banjarbaru Selatan.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran dari penyusunan tugas akhir sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan

Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu menentukan lokasi alternatif ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, ditentukan beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Identifikasi RTH Publik eksisting di Kecamatan Banjarbaru Selatan
2. Menganalisis kebutuhan RTH Publik di Kecamatan berdasarkan jumlah penduduk
3. Menganalisis jangkauan pelayanan RTH Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan
4. Menganalisis kesesuaian lokasi pengembangan RTH Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan
5. Menganalisis dan menentukan lokasi alternatif untuk RTH Publik

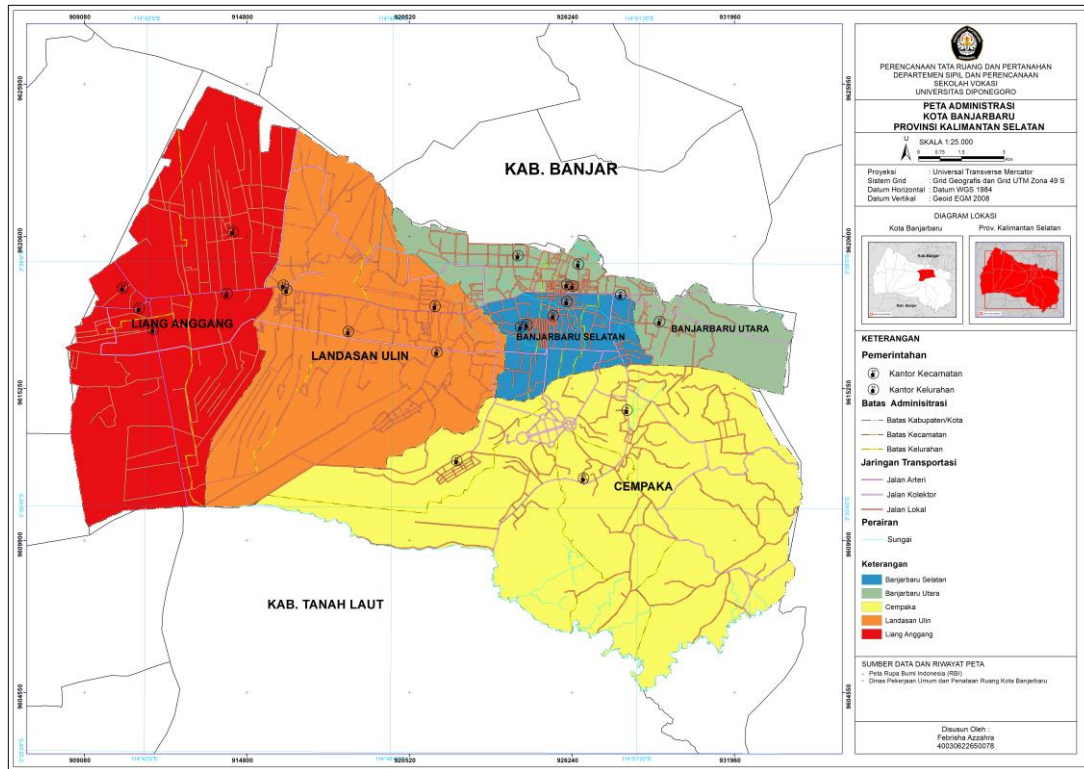
1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dua aspek utama yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup secara penelitian. Ruang lingkup wilayah menjelaskan batasan area yang menjadi objek penelitian, dan Ruang lingkup materi adalah batasan pembahasan yang menjelaskan apa saja aspek yang dikaji dalam laporan tugas akhir.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

- **Ruang Lingkup Wilayah Makro**

Kota Banjarbaru adalah kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan luas wilayah 305,153 Km². Secara administratif, Kota Banjarbaru terbagi menjadi lima kecamatan yaitu kecamatan Liang Anggang, Landasan Ulin, Cempaka, Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara. Kelima kecamatan tersebut terdiri dari empat kelurahan, sehingga terdapat 20 Kelurahan di Kota Banjarbaru.



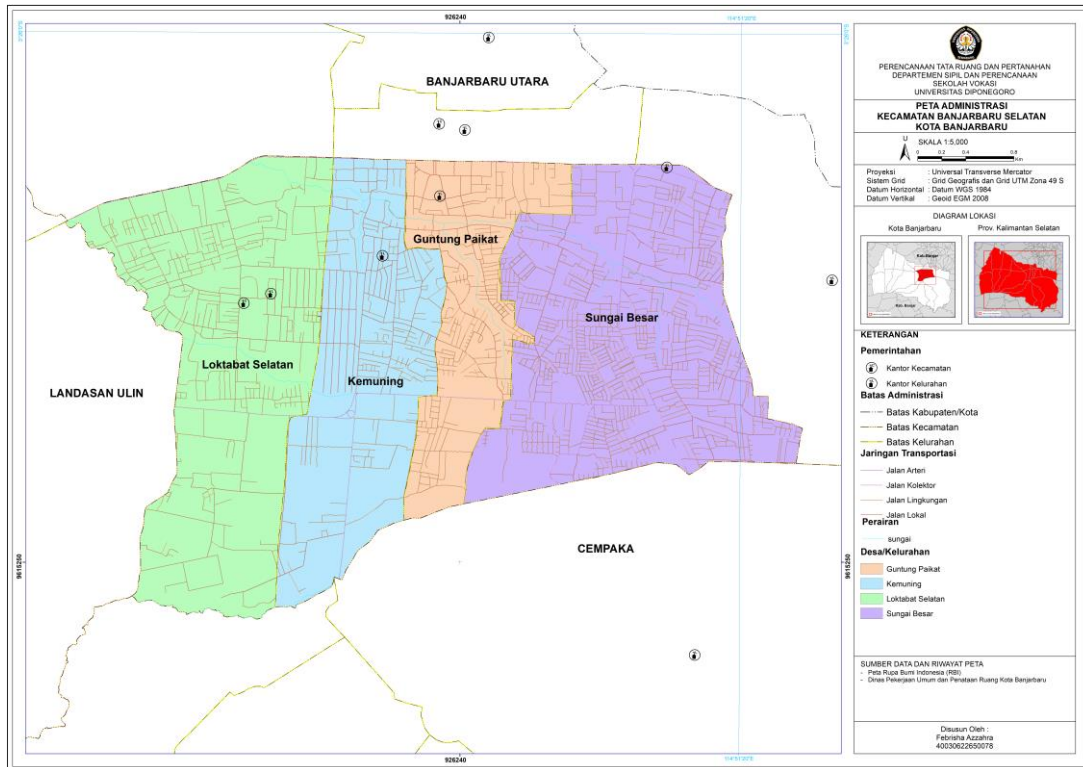
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, 2026

Gambar 1 Peta Administrasi Kota Banjarbaru

- Utara : Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
- Barat : Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Timur : Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar
- Selatan : Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut

• **Ruang Lingkup Wilayah Mikro**

Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru. Memiliki luas wilayah 15,006 Km², terdiri dari 4 Kelurahan yaitu kelurahan Sungai Besar, Guntung Paikat, Kemuning dan Loktabat Selatan. Dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 49.822 Jiwa dengan kepadatan penduduk Kecamatan Banjarbaru Selatan mencapai 3.320,14 Jiwa/Km². Dengan kepadatan terbesar terletak di Kelurahan Guntung Paikat sebesar 4.236,79 jiwa/km² dan terendah di kelurahan Loktabat Selatan sebesar 2.144,25 jiwa/km². Berikut merupakan batas wilayah administrasi Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, 2026

Gambar 2 Peta Administrasi Kecamatan Banjarbaru Selatan

- Utara : Kecamatan Banjarbaru Utara
- Timur : Kecamatan Banjarbaru Utara
- Barat : Kecamatan Landasan Ulin
- Selatan : Kecamatan Cempaka

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Pada penelitian ini terdapat batasan pembahasan untuk tercapainya tujuan dari penelitian melalui sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan batasan ini diberikan agar tema pembahasan berfokus pada tema yang diambil. Berikut aspek-aspek yang menjadi batasan dalam penelitian ini:

1. Identifikasi RTH Publik eksisting

Identifikasi RTH Publik Eksisting merupakan proses pendataan seluruh RTH Publik yang sudah tersedia di wilayah studi. Tujuannya untuk mengetahui kondisi, luas dan distribusi RTH eksisting sebelum melakukan perencanaan (Azra, 2024). Ruang

lingkup materi dalam penelitian ini mencakup beberapa jenis RTH Publik yaitu taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW dan taman RT.

2. Analisis kebutuhan RTH Publik

Analisis kebutuhan RTH publik merupakan perhitungan dalam menentukan jumlah RTH yang diperlukan dengan mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk dan standar minimalnya untuk mengetahui standar minimal tersedia RTH di suatu wilayah (Salamuddin, 2022). Pada analisis kebutuhan RTH Publik ini, penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk. Perhitungan dengan mengalikan jumlah penduduk dengan standar kebutuhan luas RTH per kapita sesuai Permen PU Nomor 5 Tahun 2008,

3. Analisis jangkauan pelayanan RTH Publik

Analisis jangkauan pelayanan merupakan penilaian dalam menilai radius atau jarak layanan RTH terhadap masyarakat. Bertujuan untuk memastikan sebuah sarana dapat dijangkau oleh masyarakat secara efektif dan merata (Azra, 2024). Pada analisis jangkauan pelayanan ini dilakukan dengan pendekatan spasial menggunakan software Qgis dengan *Tools isochrone* untuk menghasilkan peta jangkauan pelayanan RTH Publik dengan ketentuan standar Jangkauan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022.

4. Analisis kesesuaian lokasi pengembangan RTH Publik

Analisis kesesuaian lokasi pengembangan bertujuan menilai apakah lahan tersebut layak untuk dijadikan RTH publik dengan beberapa variabel yang dinilai sesuai Untuk memastikan tingkat kecocokan (Salamuddin, 2023). Pada analisis kesesuaian dilakukan pendekatan spasial dengan metode *overlay* untuk menghasilkan peta kesesuaian lokasi pengembangan RTH Publik.

5. Analisis penentuan lokasi alternatif RTH Publik

Analisis penentuan lokasi alternatif untuk RTH Publik adalah dengan metode *overlay* hasil dari data analisis sebelumnya untuk menentukan lokasi optimal dengan mempertimbangkan kebutuhan, jangkauan pelayanan, kesesuaian lokasi dan status kepemilikan lahan pemerintah daerah.

1.5 Tahapan/Proses

Adapun tahapan/proses dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan, diawali dari menentukan tema penelitian. Selanjutnya, melakukan pengumpulan literatur sesuai tema yang relevan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Kemudian, identifikasi fenomena yang terjadi di wilayah studi untuk memahami kondisi wilayah. Setelah itu, membuat rumusan masalah terkait ruang terbuka hijau analisis di wilayah studi, identifikasi tujuan dan sasaran dalam penelitian untuk mengetahui penentuan lokasi alternatif RTH Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan dengan menggunakan secara data sekunder. Data tersebut didapatkan diberbagai sumber resmi, yaitu permohonan data ke instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Banjarbaru, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Data diperoleh kemudian digunakan sebagai input proses pengolahan

3. Tahap Pengolahan dan Analisis

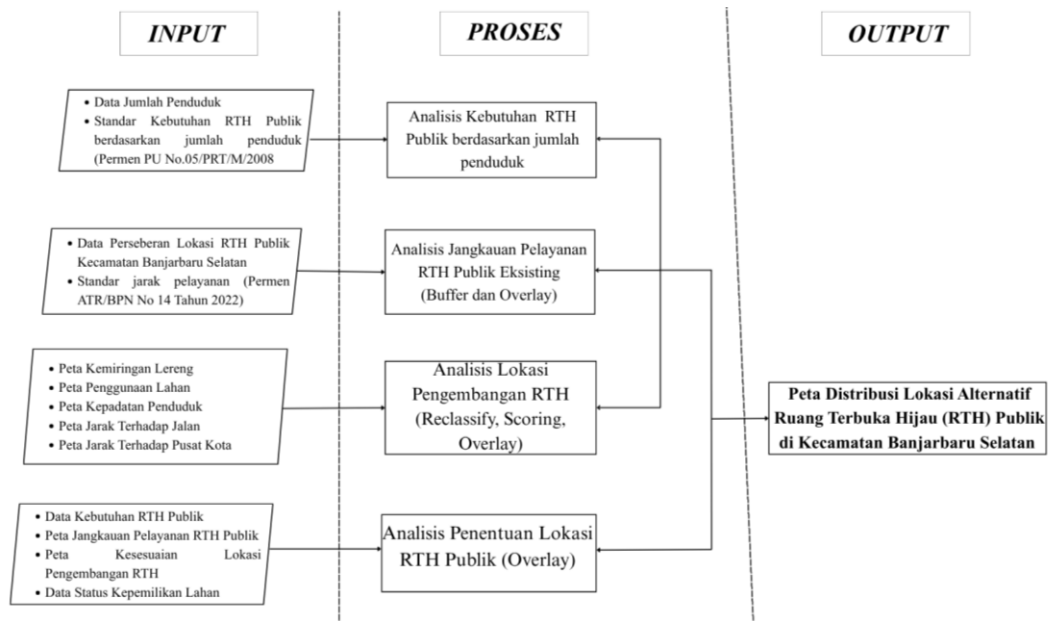
Pada tahap pengolahan data dan analisis kebutuhan untuk menentukan kebutuhan RTH berdasarkan standar per kapita. Selanjutnya, melakukan pengolahan jangkauan pelayanan dengan menggunakan metode *isochrone*. Selanjutnya melakukan analisis kesesuaian lokasi pengembangan RTH Publik. Dalam pengolahan kesesuaian lokasi pengembangan dengan metode skoring pembobotan selanjutnya dilakukan proses *overlay*. Setelah melakukan 3 analisis tersebut dilakukan pengolahan terakhir dalam analisis penentuan lokasi alternatif RTH Publik dilihat dari status kepemilikan lahan tersebut dengan metode *overlay*. Dalam pengolahan data menggunakan software Arcgis 10.4 dan Excel.

4. Output

Pada output ini, akan menampilkan peta distribusi lokasi alternatif RTH Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan tahun. Peta tersebut bertujuan sebagai alternatif lokasi berdasarkan kondisi wilayah yang tidak terlayani.

1.6 Metode dan Hasil Akhir

1.6.1 Metode



Sumber: Hasil Olah, 2025

Gambar 3 Diagram Proses Analisis

A. Kebutuhan Data

Kebutuhan data berisikan kebutuhan data disertai dengan tahun data, bentuk data hingga sumber data tersebut. Bertujuan untuk mempermudah pengolahan analisis untuk data apa saja yang digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini:

Tabel 1 Kebutuhan Data

Nama Data	Jenis Data	Tahun Data	Bentuk Data	Sumber Data
Data Kependudukan dan Kepadatan Penduduk	Sekunder	2025	Tabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peta Dasar Kota Banjarbaru	Sekunder	2025	SHP	DPUPR Kota Banjarbaru
Peta Kelerengan	Sekunder	2025	SHP	DPUPR Kota Banjarbaru

Nama Data	Jenis Data	Tahun Data	Bentuk Data	Sumber Data
Penggunaan lahan	Sekunder	2025	SHP	DPUPR Kota Banjarbaru
Data persebaran lokasi RTH Publik Eksisting Kecamatan Banjarbaru Selatan	Sekunder	2025	SHP	DLH Kota Banjarbaru
Status Kepemilikan Lahan	Sekunder	2025	SHP	BPN Kota Banjarbaru

Sumber: Hasil Analisis, 2025

B. Instrumen Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data mencakup data sekunder dari permohonan instansi. Metode pengumpulan data sekunder pada penelitian diperoleh dari beberapa instansi pemerintah dan laman resmi penyedia data. Seperti halnya pada pengumpulan data peta dasar, data penggunaan lahan, data kelerengan, data persebaran lokasi RTH Publik Eksisting yang di dapatkan dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Banjarbaru, status kepemilikan lahan yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru.

1.6.2 Teknik Analisis

1. Analisis Kebutuhan RTH Publik

Pada teknik ini digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan jumlah penduduk wilayah penelitian. Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau publik berdasarkan jumlah penduduk mengacu pada Permen PU No 5 Tahun 2008.

2. Analisis Jangkauan Pelayanan RTH Publik Eksisting

Pada teknik ini ini digunakan untuk mengukur jangkauan pelayanan RTH Publik eksisting Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu menggunakan *tools isochrone*. Data yang digunakan untuk melakukan *isochrone* adalah BaseMap Google Satelite, titik lokasi persebaran RTH publik eksisting serta radius pelayanan untuk masing-masing jenis RTH Publik mengacu Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Setelah melakukan *isochrone* pada

dilakukan *intersect* dengan wilayah penelitian. Dengan analisis ini akan diketahui wilayah yang sudah terlayani atau belum terlayani sesuai dengan kebutuhannya.

3. Analisis Kesesuaian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Pada teknik ini digunakan untuk menilai kesesuaian lahan dengan metode skoring dan pembobotan. Terdapat beberapa data dalam pengolahan kesesuaian yang digunakan dalam analisis ini seperti peta penggunaan lahan, peta kelerengan, kepadatan penduduk, aksesibilitas dan sarana pendukung. Setelah dilakukan skoring dan pembobotan akan dilakukan pengklasifikasian menjadi 3 kelas yaitu tidak sesuai, cukup sesuai dan sesuai untuk difungsikan sebagai ruang terbuka hijau publik.

Tahap selanjutnya dilakukan proses *overlay* dengan menjumlahkan skor pembobotan dari lima variabel peta kesesuaian tersebut. Perhitungan pengklasifikasian skor akhir dikelompokkan berdasarkan kelas Interval. Setelah melakukan perhitungan Interval, maka hasil penjumlahan didapat skor tertinggi hingga terendah yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 kelas yaitu tidak sesuai, cukup sesuai dan tidak sesuai.

4. Analisis penentuan lokasi RTH Publik

Pada teknik ini digunakan untuk identifikasi lokasi-lokasi sesuai dan lahan yang layak dikembangkan menjadi RTH publik baru melalui analisis spasial dengan metode *intersect overlay* dengan kesesuaian lahan, penggunaan lahan non terbangun dan status kepemilikan tanah pemerintah. Setelah melakukan analisis penentuan, maka dilakukan validasi hasil yang bertujuan untuk memastikan bahwa lokasi yang ditentukan sesuai dan dapat di implementasikan di lapangan.

1.6.3 Hasil Akhir

Hasil akhir dari dari pengolahan ini berupa peta distribusi lokasi alternatif RTH Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan yang diharapkan dapat mendukung pemerataan RTH Publik dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Banjarbaru.

1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada laporan tugas akhir yang terdiri dari

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat gambaran awal terkait penelitian ini yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, dan metode penelitian.

BAB 2 KONSEP PERENCANAAN

Pada bab ini memuat teori-teori yang digunakan dan relevan dengan judul penelitian untuk mencapai tujuan, mencakup konsep perencanaan kerangka pikir dan kajian teori yang berisikan definisi RTH Publik, Tipologi RTH, kebutuhan RTH, Jangkauan pelayanan RTH dan kriteria kesesuaian lokasi RTH Publik.

BAB 3 PROFIL WILAYAH

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum wilayah penelitian Kecamatan Banjarbaru Selatan pada setiap aspek seperti fisik alam, kependudukan, penggunaan lahan, dan persebaran lokasi RTH Publik di Kecamatan Banjarbaru Selatan.

BAB 4 ANALISIS DAN PENENTUAN LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Pada bab ini membahas seluruh analisis yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini, yaitu analisis kebutuhan ruang terbuka hijau publik, analisis jangkauan pelayanan ruang terbuka hijau publik eksisting, analisis kesesuaian lokasi pengembangan ruang terbuka hijau publik dan analisis penentuan lokasi ruang terbuka hijau publik.

BAB 5 PENUTUP

Dan bab terakhir memuat kesimpulan yang berisi rangkuman hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dan saran yang berisikan masukan berdasarkan hasil penelitian.